

Maksimalisasi Pendapatan Daerah dari Retribusi IMB di DKI Jakarta (Studi Komparatif Antar Kota Administrasi)

Mulia Rahmah
Universitas Krisnadwipayana
muliarahmah@gmail.com

Abstract : Maximizing revenue acquisition is often viewed as one of the prerequisites for the implementation of regional development. However, in the process of maximizing revenue trapped many local governments in the region extending activities income which is exploitative and tend to conflict with higher laws. The purpose of this study is to analyze one of the building permit levies that affect local revenue. This study uses the Regional Income as the dependent variable, while Building Permit (Levies Development Supervision and Levies Building Control) as independent variables, which the IMB is very influential on regional income.

Keyword : Regional Income (Pendapatan Daerah), Building Permit (Izin Mendirikan Bangunan), Levies Development Supervision (Retribusi Pengawasan Pembangunan), and Levies Building Control Supplement (Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan).

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah akan mengupayakan pendapatan daerahnya dan mengusahakan pembangunan bagi daerahnya sendiri-sendiri. Jadi setiap daerah harus meningkatkan potensi daerahnya

masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk melaksanakan pembangunan tempat tinggal baik yang dilakukan oleh pribadi maupun pihak swasta yang mempunyai bidang usaha di bidang pembangunan diperlukan izin yang dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun kenyataannya dapat kita lihat khususnya di Kota DKI Jakarta banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi yang berwenang. Kadang-kadang sebagian masyarakat itu mendirikan, menambah

atau menurangi suatu bangunan tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan alasan yang bermacam-macam seperti tingginya biaya pengurusan, prosedur yang berbelit-belit dan sebagainya.

Maka penulis ingin mengetahui apakah ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu sudah terlaksana sebagaimana mestinya sehingga

LANDASAN TEORI

Pelaksanaan Otonomi Daerah lebih efektif ketika Daerah secara mandiri mampu mengelola urusan rumah tangga sendiri, yang mutlak wajib ditopang oleh anggaran sendiri yang memadai. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah yang penting sebagai tumpuan pokok penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berotonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah langkah bijak dan mendasar bagi terjaminnya pemenuhan tingkat Pendapatan Daerah yang dibutuhkan Daerah bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib memperhatikan segi formal dan memahami benar segi material atau substansinya, sehingga PERDA sebagai sarana fundamental implementasi upaya optimalisasi pendapatan Daerah dapat efektif dan akuntabel.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Pendapatan yang diperoleh

berpengaruh pada Pendapatan Daerah - Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Karena penulis berpendapat bahwa izin mendirikan bangunan ini merupakan izin yang sangat penting baik bagi pemerintah maupun pemilik bangunan. Untuk itu penulis mengambil judul “Maksimalisasi Pendapatan Daerah dari Retribusi IMB di DKI Jakarta (Studi Komparatif antar Kota Administrasi)”. dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab VIII Pasal 157, Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah yang Selanjutnya disebut PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah dapat lebih besar daripada pendapatan dari pajak daerah.

Yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk. Sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari hukum administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan.

Jadi izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Kelapa (sebelum 1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia, atau Jacatra (1619-1942), dan Djakarta (1942-1972). Jakarta Memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan : 6.977,5 km², dengan penduduk berjumlah 9.588.198 jiwa

Kota Administrasi adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah provinsi. Saat ini terdapat 5 kota administrasi yang hanya berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu : Kota administrasi Jakarta Barat, Kota

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif komperatif yaitu suatu

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan bangunan yang dimaksud agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Dengan kata lain izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan jika rencana bangunan dinilai telah memenuhi ketentuan yang meliputi aspek pertanahan aspek planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta, Jakarta Raya) adalah ibu kota Negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di bagian barat laut pulau Jawa. Dahulu Pernah dikenal dengan nama Sunda

(2010). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpendudukan sekitar 23 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia.

administrasi Jakarta Pusat, Kota administrasi Jakarta Selatan, Kota administrasi Jakarta Timur, Kota administrasi Jakarta Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

penelitian yang bersifat membandingkan.

Untuk mempermudah perhitungan dan pengelolaan data

for Social Sciences (SPSS) Versi 11,5 agar diperoleh hasil yang akurat dan

Dalam penelitian ini, digunakan variable dari kelompok Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (*Independent Variable*) yang terdiri dari :

1. Jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)
2. Jumlah Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT)

Dan pendapatan daerah (*Dependent Variable*)

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hipotesis Retribusi IMB tersebut terhadap pendapatan daerah pada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta periode 2005 sampai dengan April 2010

Pada penelitian ini penulis membatasi tempat penelitian hanya pada enam kota administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. sampel yang digunakan dalam penelitian memaksimalkan pendapatan daerah dari retribusi IMB (studi komparatif antar kota administrasi) ini akan mengolah data dari Laporan Keuangan Penerimaan Retribusi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan alat bantu program software Statistical Package

Adapun metode yang digunakan penulis mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan guna mengetahui proses memaksimalkan pendapatan daerah dari retribusi IMB (studi komparatif antar kota administrasi) adalah :

1. *Study Literatur*

dapat digunakan.

Dalam hal ini penulis mempelajari dan memperoleh informasi dan data yang bersifat teoritis berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah. Dalam hal ini penulis memperoleh informasi dan data yang bersifat teoritis, dengan mengunjungi perpustakaan Magister Akuntansi Trisakti, perpustakaan Fakultas Ekonomi Trisakti di Jakarta.

2. Penelitian Lapangan

Dalam hal ini penulis menganalisa dan mengumpulkan data-data pendapatan daerah dari retribusi IMB untuk enam wilayah kota administrasi di kantor Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2005 sampai dengan April 2010 untuk 5 (lima) Kota Administrasi yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan.

Metode analisis merupakan langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam menganalisa hubungan antara *independent variable* dengan *dependent variable*. Metode analisis yang digunakan meliputi :

1. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal.

Asumsi bahwa data yang digunakan adalah berdistribusi normal, yaitu, distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yaitu distribusi data tidak melenceng ke kiri atau ke kanan.

Asumsi bahwa data yang digunakan berasumsi normal, diperlukan untuk mengarahkan statistical tes (*uji signifikansi*) dari variable-variable independen (Koutsoyoanis, 1995). Jika hal ini diabaikan maka model regresi tetap tidak bias dan bagus, namun kita tidak dapat menguji keadaan atau signifikansi variable-variable independen dengan menggunakan uji F, uji t dan lain-lain. Alasan itulah yang mendasari perlu dilakukan uji distribusi normal.

Beberapa metode yang bias digunakan diantaranya jika menggunakan program SPSS dengan memakai *Metode Kolmogoreoc-Smirnov (Uji Lilliefors)* atau dengan melihat skewness atau kurtosis dari keseluruhan variable. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Metode Kolmogorov-Smirnov (Uji Lilliefors)*.

b. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model linear berganda ada kolerasi pada periode sebelumnya. Pengujian ada atau tidak adanya autokolerasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson (DW Test)*.

c. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dalam analisis regresi adalah variasi gangguan acak pada setiap variable bebas yaitu Homoskedastisitas. Salah satu bentuk pengujian Heteroskedastisitas adalah pengujian uji Glejser

2. Analisa Regresi

a. Analisis Regresi Sederhana atau Uji Individu (uji T)

Model regresi linier sederhana digunakan untuk membuktikan apakah variable-variable independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh terhadap variable dependen. Kemudian dilakukan uji t. Dalam uji t ini, pada dasarnya untuk menguji hipotesis yang dinyatakan sebagai berikut.

1) $H_0 : \beta = 0$ artinya tidak terhadap pengaruh yang nyata antar variabel independen (X) secara sendiri-sendiri terhadap variable dependen (Y)

2) $H_1 : \beta \neq 0$ artinya terdapat pengaruh yang nyata antara variabel independent (X) secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen (Y)

3) Level signifikansi (α) = 0.05

b. Koefisien determinasi (Pengujian R^2 dan Adjusted R^2)

R^2 atau koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar perilaku dari variabel independen mampu menjelaskan perilaku dari variabel dependennya. Koefisien determinasi mengukur *goodness of*

fit dari persamaan regresi, yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variable dependen yang dijelaskan oleh variable independen.

Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1 Nilai $R^2 = 1$, berarti bahwa garis regresi yang terjadi menjelaskan 100% variasi dalam variabel dependen, jika $R^2 = 0$ berarti bahwa model yang terjadi tidak dapat menjelaskan sedikitpun garis regresi yang terjadi. Tingginya R^2 yang kita cari, dalam analisis empiris sering dijumpai model yang mempunyai R^2 tinggi. Namun ternyata memiliki koefisien regresi yang

tidak signifikan ataupun berbeda dengan harapan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa bagus tidaknya suatu model bukanlah ditentukan oleh R^2 yang tinggi, namun lebih memperhatikan relevansi logis dan teoritis dari variabel independent dengan variabel dependen dan arti statistik.

c. Uji Beda

Setelah dilakukan analisis data dengan menggunakan Uji asumsi klasik dan Analisis Regresi dilakukan uji beda dengan menggunakan :

- 1) Uji Normalitas
- 2) Uji Beda Rata-Rata

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Uji Statistik

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa mengambil

keputusan. Dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan.

Dibawah ini merupakan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan:

Tabel I
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	17	5480000.00	37699087636.00	8626677504.3529	9026510707.87734
Pendapatan Daerah	17	6490000.00	40783125684.00	9462845557.0000	9851478959.48854
Valid N (listwise)	17				

Pada tabel diatas, diketahui bahwa variable izin mendirikan bangunan (IMB) mempunyai nilai minimum sebesar Rp.5.480.000,00 yaitu Kota Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2009; dengan nilai maksimum sebesar Rp.37.699.087.636,00 yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2008; rata-rata yang didapat dari 17 observasi

adalah sebesar Rp.8.626.677.504,3529 dan standar deviasi sebesar Rp.9.026.510.707,87734.

Variable pendapatan daerah mempunyai nilai minimum sebesar Rp.6.490.000,00 yaitu Kota Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2009; dengan nilai maksimum sebesar Rp.40.783.125.684,00; yaitu kota administrasi Jakarta Selatan Tahun 2008;

rata-rata yang didapat dari 17 observasi adalah sebesar Rp.9.462.845.557,0000

Metode Analisis Data

Sebelum dilakukan pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian pelanggaran asumsi klasik untuk model yang digunakan dalam penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.

Uji Normalitas dilakukan dengan analisis Grafik Normal P-P Plot.

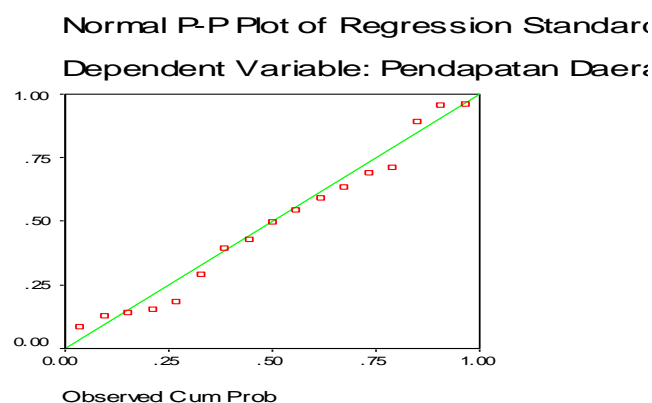
dan standar deviasi sebesar Rp.9.851.478.959,48854.

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal.

Dasar pengambilan keputusannya:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar I
Hasil Uji Normalitas



Dari hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa data di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error dengan error periode sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Uji autokorelasi dilakukan dengan

menggunakan Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson berkisar diantara nilai batas atas (d_U) maka diperkirakan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi.

Hipotesa Autokorelasi :

H_0 : tidak ada Autokorelasi

H_a : ada Autokorelasi

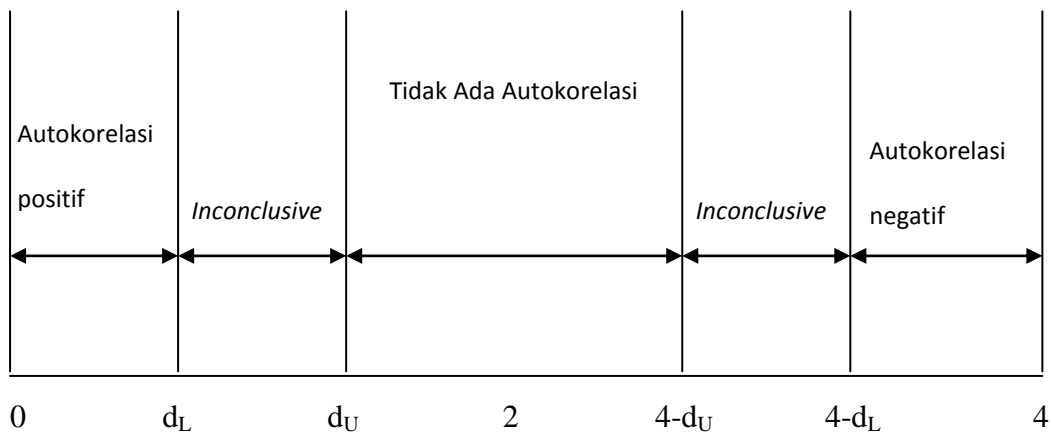
Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II
Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesa Nol (H_0)	Keputusan	Kriteria
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < dw < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_L \leq dw \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Diterima	$d_U < dw < 4-d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-d_U \leq dw \leq 4-d_L$
Tidak ada autokorelasi negatif	Ditolak	$4-d_L < dw < 4$

Yang dinyatakan dengan gambar adalah sebagai berikut:

Gambar II
Uji Autokorelasi



Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel III
Hasil Uji Autokorelasi

n	κ'	dl	du	4-du	4-dl	Dw	Kesimpulan
17	1	1,133	1,381	2,619	2,867	1,666	Tidak ada autokorelasi

n = jumlah observasi.

κ' = jumlah variable bebas tidak termasuk konstanta

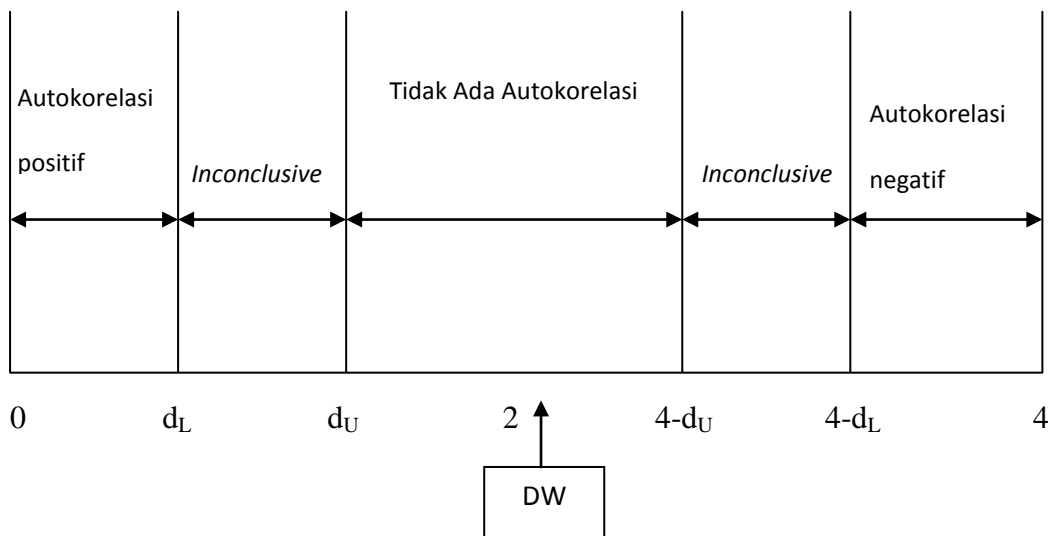
Dari hasil uji autokorelasi di atas diketahui bahwa model yang diteliti mempunyai jumlah observasi sebesar 17,

dengan jumlah variable bebas sebesar 1. Maka didapat nilai batas bawah (dl) sebesar 1,133, dengan batas atas (du)

sebesar 1,381. Hasil uji durbin watson statistik didapat sebesar 1,666, berada diarea $d_U < d_W < 4-d_U$, atau berada diarea tidak ada autokorelasi positif dan

Negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

Gambar III
Gambar Pengujian Autokorelasi
Uji Autokorelasi



Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa *varians* dari setiap error bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi Hipotesa Heteroskedastisitas :
 Ho : tidak ada Heteroskedastisitas
 Ha : ada Heteroskedastisitas
 Dasar Pengambilan Keputusan :
 Jika *Sig.* > 0,05, Ho diterima *varians error homogen* (tidak ada heteroskedastisitas).

klasik yang mensyaratkan bahwa *varians* dari *error* harus bersifat homogen. Pengujian dilakukan dengan uji glejser.

Jika *Sig.* < 0,05, Ho ditolak *varians error heterogen* (ada heteroskedastisitas).

Hasil pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel IV
Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keputusan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0,621	Tidak ada heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Uji Hipotesa dan Pembahasan

Pengujian Parsial (Uji t) : Pengaruh Independen variable (Retribusi IMB) terhadap Dependent variable (Pendapatan Daerah)

Untuk menguji hipotesa dilakukan pengujian secara parsial untuk melihat signifikansi dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan.

Dasar pengambilan keputusan

Jika $p\text{-value} < \alpha_{0,05}$ maka H_0 ditolak.

Jika $p\text{-value} > \alpha_{0,05}$ maka H_0 diterima.

Tabel V
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.297	.129		2.296	.037
	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	.991	.006	1.000	168.522	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

Dari pengujian regresi dapat dilihat bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) mempunyai pengaruh yang positif sebesar 0,991 terhadap pendapatan daerah. Nilai signifikansi yang didapat

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka yang berarti izin mendirikan bangunan (IMB) berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Koefisien Determinasi (Pengujian R^2 dan Adjusted R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali, Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS, 2002).

Tabel VI
Hasil Uji R^2 dan Adjusted R^2

R^2	Adjusted R^2
0,999	0,999

Dari hasil pengujian regresi didapat nilai R^2 adalah 0,999. Artinya variabel independen yang terdiri dari izin mendirikan bangunan (IMB) mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu pendapatan daerah sebesar 99,9%. Sedangkan sisanya sebesar 0,1% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian.

Uji Beda

Setelah dilakukan anaisa data dengan menggunakan Uji asumsi klasik

dan Analisis Regresi dilakukan uji beda dengan menggunakan :

Uji Normalitas

Dengan Hipotesis

H_0 : distribusi populasi normal

H_1 : distribusi populasi tidak normal

Pengambilan Keputusan:

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas:

Jika sig. > 0,05, H_0 diterima, data berdistribusi normal

Jika sig. < 0,05, H_0 ditolak, data berdistribusi tidak normal

Tabel VII
Pengujian Normalitas

No.	Variabel	Sig.	Keputusan
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0.028	Tidak Normal
2	Pendapatan Daerah	0.035	Tidak Normal

Berdasarkan tabel pengujian Normalitas diatas, diketahui bahwa variabel izin mendirikan bangunan (IMB) dan pendapatan daerah berdistribusi tidak normal karena mempunyai tingkat signifikansi < 0,05.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka metode yang digunakan untuk

menguji perbedaan rata-rata untuk variabel izin mendirikan bangunan (IMB) dan pendapatan daerah adalah **Kruskal-Wallis Test**, karena variabel izin mendirikan bangunan (IMB) dan pendapatan daerah yang diteliti berdistribusi tidak normal.

Uji Beda Kruskal-Wallis Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Pendapatan Daerah
N		17	17
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	21.8706	21.9606
	Std. Deviation	2.45911	2.43649
Most Extreme Differences	Absolute	.355	.345
	Positive	.180	.179
	Negative	-.355	-.345
Kolmogorov-Smirnov Z		1.462	1.421
Asymp. Sig. (2-tailed)		.028	.035

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Ranks

Kota Administrasi		N	Mean Rank
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Jakarta Pusat	3	9.50
	Jakarta Utara	3	9.50
	Jakarta Barat	3	12.00
	Jakarta Selatan	3	11.33
	Jakarta Timur	3	7.67
	Kep. Seribu	2	1.50
	Total	17	
Pendapatan Daerah	Jakarta Pusat	3	9.67
	Jakarta Utara	3	9.33
	Jakarta Barat	3	12.00
	Jakarta Selatan	3	11.67
	Jakarta Timur	3	7.33
	Kep. Seribu	2	1.50
	Total	17	

Test Statistics^{a,b}

	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Pendapatan Daerah
Chi-Square	6.387	6.699
df	5	5
Asymp. Sig.	.270	.244

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Kota Administrasi

Uji Beda Rata-Rata

Dengan Hipotesa :

H_0 : tidak terdapat perbedaan keenam rata-rata izin mendirikan bangunan (IMB) dan pendapatan daerah pada kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

H_a : terdapat perbedaan keenam rata-rata izin mendirikan bangunan (IMB) dan pendapatan daerah pada kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Pengambilan Keputusan

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas:

Jika $\text{sig.}(p\text{-value}) > 0,05$, H_0 diterima, berarti tidak terdapat perbedaan keenam rata-rata izin mendirikan bangunan (IMB) dan pendapatan daerah pada kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Jika $\text{sig.}(p\text{-value}) < 0,05$, H_0 ditolak, berarti terdapat perbedaan keenam rata-rata izin mendirikan bangunan (IMB) dan pendapatan daerah pada kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Tabel VIII
Hasil Pengujian Independent Samples T-test

No.	Variabel	Sig.	Kesimpulan
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0,270	H_0 Diterima
2.	Pendapatan Daerah	0,244	H_0 Diterima

Berdasarkan hasil uji independen sampel test diketahui bahwa $p\text{-value}$ variabel izin mendirikan bangunan (IMB) sebesar 0,270 lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan keenam rata-rata izin mendirikan bangunan (IMB) pada kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Dengan telah dilakukannya pengujian terhadap *Independent variable* yaitu retribusi IMB berpengaruh terhadap *dependent variable* yaitu daerah tersebut diatas, secara keseluruhan :

Berdasarkan hasil uji independen sampel test diketahui bahwa $p\text{-value}$ variabel pendapatan daerah sebesar 0,244 lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan keenam rata-rata pendapatan daerah pada kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Dari hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa data di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji durbin watson statistik didapat sebesar 1,666, berada di area $du < dw < 4\text{-}du$, atau

berada di area tidak ada autokorelasi positif dan negatif, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi yang digunakan. Diketahui bahwa nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Dari pengujian regresi dapat dilihat bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) mempunyai pengaruh yang positif sebesar 0,991 terhadap pendapatan daerah, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka yang berarti izin mendirikan bangunan (IMB) berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dari hasil pengujian regresi didapat nilai R^2 adalah 0,999. Artinya variabel independen yang terdiri dari izin mendirikan bangunan (IMB) mampu menjelaskan variasi dari variabel

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu untuk sampel bersyarat yang ditentukan dengan kriteria-kriteria tertentu. Dan berdasarkan kriteria, jumlah sampel yang tersedia dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) Kota Administrasi yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara Dan Kabupaten Kepulauan Seribu

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa independent variabel yaitu

dependen yaitu pendapatan daerah 99,9%. Berdasarkan tabel pengujian Normalitas diatas, diketahui bahwa variabel izin mendirikan bangunan (IMB) dan variabel pendapatan daerah berdistribusi tidak normal maka metode yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata untuk variabel izin mendirikan bangunan (IMB) dan variabel pendapatan daerah adalah **Kruskal-Wallis Test**. Dengan digunakan nya metode **Kruskal – Wallis test** maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara keenam rata-rata izin mendirikan bangunan (IMB) dan pendapatan daerah, pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

retribusi IMB sangat berpengaruh terhadap *dependent variabel* yaitu pendapatan daerah, ini dinyatakan dengan variabel Retribusi IMB mempunyai pengaruh yang positif dan mampu menjelaskan variasi dari variabel pendapatan daerah. Serta tidak terdapat perbedaan rata-rata retribusi IMB dan tidak terdapat perbedaan rata-rata pendapatan daerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, akan dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu peningkatannya pelayanan publik izin mendirikan bangunan (IMB) baik dari segi sistem atau dari segi sumber daya manusia sehingga tercipta pelayanan publik izin mendirikan bangunan (IMB) yang efisien dan efektif karena sangat berpengaruh terhadap maksimalisasi pendapatan daerah.
2. Memberikan kemudahan terhadap tata cara pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga masyarakat sadar dan memahami perlu dan pentingnya pembuatan pentingnya izin mendirikan bangunan (IMB).
3. Khususnya untuk administrasi kepulauan seribu perlu dibangunnya hotel dan resort yang inovatif agar memberikan daya tarik yang lebih bagi para turis domestik dan turis mancanegara sehingga menambah pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, Dr, MBA, Ak. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Suparmoko, M. Drs. 2001. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Husein Umar, SE. 1998. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudjarat. 2001. Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi). Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Imam Ghozali, Dr, M.Com, AKT. 2002. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang. BPFE.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. Teori Akuntansi. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sasangko, Hari. 2005. Membangun di Jakarta, Edisi ke-3. Jakarta. PT Trimitra Insani Sejahtera.
- Sasangko, Hari. 2007. Membangun di Jakarta, Edisi ke-4. Jakarta. PT Trimitra Insani Sejahtera.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, (2009). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah". Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, (2004). Tentang Pemerintahan Daerah". Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33, (2004). Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah". Direktorat Jendral Otonomi Daerah.

